



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam hal ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memberikan deskripsi menyeluruh terhadap capaian kinerja secara periode triwulan sebagai alat analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan RidhoNya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya konektivitas, aksesibilitas serta peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



Lolo Panjaitan

NIP. 19710125 199703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
C. Sumber Daya Manusia	I - 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
A. Perencanaan Strategis	II - 1
B. Perjanjian Kinerja	II - 16
BAB III AKUNTABILITAS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	
A. Capaian Kinerja	III - 1
B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	III - 4
C. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024	III - 6
D. Analisa Efisiensi Sumber Daya	III - 40
E. Realisasi Anggaran	III - 46
BAB IV PENUTUP	IV - 1
A. Kesimpulan	IV - 1
B. Langkah Kedepan	IV - 3

DAFTAR TABEL

I.1	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan	I - 10
I.2	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan	I - 10
II.1.1	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2017	II - 4
II.1.2	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2018 - 2019	II - 8
II.1.3	Perkembangan Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II - 12
II.1.4	Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2019	II - 12
II.1.5	Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	II - 13
II.1.6	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020 - 2024	II - 14
II.1.7	Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas Nasional Bidang Transportasi Laut dalam RPJMN 2020-2024	II - 16
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (awal)	II - 17
II.2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi)	II - 18
III.2.1	Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024	III - 4
III.3.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen HUBla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	III - 6
III.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Program (IKK 1) Kesatu (1).....	III - 8
III.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1).....	III - 8
III.3.4	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	III - 9
III.3.5	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)	III - 10
III.3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2).....	III - 11

III.3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)	III - 12
III.3.8	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	III - 12
III.3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3).....	III - 14
III.3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3).....	III - 14
III.3.11	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	III - 15
III.3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)	III - 16
III.3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)	III - 17
III.3.14	Disepakatinya Perjanjian Kerjasama di Bidang Transportasi Laut	III - 17
III.3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)	III - 22
III.3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)	III - 23
III.3.17	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 23
III.3.18	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024	III - 24
III.3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)	III - 25
III.3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)	III - 25
III.3.21	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 26
III.3.22	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	III - 27
III.3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)	III - 27
III.3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)	III - 28
III.3.25	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	III - 28

III.3.26	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut Perbulan	III - 29
III.3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)....	III - 30
III.3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)	III - 31
III.3.29	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru / Revisi / Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	III - 32
III.3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)....	III - 35
III.3.31	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)	III - 35
III.3.32	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	III - 36
III.3.33	Realisasi Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN)	III - 37
III.3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)	III - 38
III.3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)	III - 38
III.4.1	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	III - 40
III.5.1	Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024	III - 46

DAFTAR GRAFIK

III.3.1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	III - 7
III.3.2	Peningkatan Kompetesni SDM Ditjen Perhubungan Laut	III - 10
III.3.3	Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	III - 13
III.3.4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	III - 15
III.3.5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	III - 22
III.3.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 24
III.3.7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	III - 26
III.3.8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	III - 30
III.3.9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru / Revisi / Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	III - 34
III.3.10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	III - 37

DAFTAR GAMBAR

- I.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut... I - 4



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang yang lebih difokuskan pada keuangan, hal itu menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut dapat menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai langkah maju diperlukan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 dikeluarkan Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Capaian Kinerja, dan juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2024 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan laporan atas pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disebut Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran strategis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima.



Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025,
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara,
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan,
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah,
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan instansi Pemerintah,
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



- 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan,
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,;
 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 26. Surat Keputusan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
 27. Surat Keputusan Direktorat Jenderal tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024.
 28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan



B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 17 Tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Jenderal Perhubungan Laut.

2. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan



aparatus fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;

- c. Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Fungsi Bagian Perencanaan

- a) Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Keuangan

- a) Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan revidi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b) Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan



- c) Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan,
- d) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ektern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan.

c. Bagian Sumber Daya Manusia

1) Tugas Bagian Sumber Daya Manusia

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.



d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

1) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- a) Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- b) Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

e. Bagian Umum dan Perlengkapan

1) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan



pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan

- c) Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

1) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standardisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2024 yaitu 309 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.1. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1.	S3	0	0
2.	Spesialis	1	1
3.	S2	47	47
4.	S1	135	135
5.	D4	2	2
6.	D3	40	40
7.	D2	0	0
8.	D1	10	10
9.	SLTA	74	74
10.	SLTP	0	0
11.	SD	0	0
TOTAL		309	309

- b. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.2. Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	0	0
3.	IV/c	1	1
4.	IV/b	4	4
5.	IV/a	7	7
6.	III/d	66	66
7.	III/c	49	49
8.	III/b	78	78
9.	III/a	44	44
10.	II/d	26	26
11.	II/c	18	18
12.	II/b	3	3
13.	II/a	9	9
14.	I/d	1	1
15.	I/c	0	0
16.	I/b	0	0
17.	I/a	0	0
TOTAL		309	309



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2024

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada RENSTRA Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 - 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024.

Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019

Evaluasi atas capaian kinerja berupa realisasi dari target pencapaian Sasaran Strategis (SS) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019

yang diukur melalui pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah IKU serta sasaran yang telah ditetapkan:

1. Pada sasaran "**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dukungan Administrasi dan Teknis**" dengan indikator kinerja utama, meliputi:
 - Jumlah kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT).
 - Jumlah Pedoman/ Standar/ Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
2. Pada sasaran "**Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dan Kompetensi SDM Aparatur/ Teknis**" dengan indikator kinerja utama, meliputi:
 - Jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis).
 - Jumlah Kebutuhan Tenaga CPNS.
 - Jumlah Pegawai yang Mutasi.
 - Jumlah Pegawai yang Pensiun.



- Jumlah Penyelenggaraan Bimtek terkait Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Umum dan Perlengkapan dan Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
 - Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi.
3. Pada sasaran “**manajemen pengelolaan keuangan, Asset dan PNB**” dengan indikator kinerja utama, meliputi:
- Prosentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 - Nilai BMN pada neraca Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut.
 - Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut.
4. Pada sasaran “**Meningkatnya manajemen kinerja melalui dukungan administrasi dan teknis**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan Administrasi dan Teknis
 - Jumlah kegiatan Evaluasi / Monitoring / Pembinaan / Penyuluhan / Sosialisasi
 - Jumlah Studi dan Kajian yang disusun.
5. Pada sasaran “**Meningkatnya pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perkantoran lainnya**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Volume Gedung Kantor yang Fungsinya terpulihkan (Gedung).
 - Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perlengkapan kantor.
 - Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor.
 - Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional.
 - Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran.
6. Pada sasaran “**Meningkatnya pemenuhan dan efektifitas pelaksanaan regulasi dalam penyelenggaraan Transportasi Laut**” dengan indikator kinerja utama, meliputi:
- Jumlah rancangan dan peraturan yg ditetapkan.
 - Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan.
 - Jumlah penyelesaian perkara.
7. Pada sasaran “**Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional**” dengan indikator kinerja utama meliputi:
- Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri.



- Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan dan Perjanjian dalam rangka Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral.

8. Pada sasaran **“Meningkatnya kinerja kehumasan dalam memfasilitasi peningkatan peran serta *stakeholders*”** dengan indikator kinerja utama meliputi:

- Jumlah kegiatan Pelayanan informasi bagi Masyarakat Umum.
- Jumlah kegiatan Kehumasan dan Protokoler.





Tabel II.1.1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2015			2016			2017		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1. Jumlah kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan/ Pengembangan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Sistem	3	4	133,33	6	4	66,67	1	2	200
2. Jumlah Pedoman/ Standar/ Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan	Pedoman/ Standar/ Protap	3	3	100	6	3	50	3	1	33.33
3. Jumlah SDM transportasi laut yang bersertifikat (aparatur teknis)	Orang	3.870	954	24,65	3.511	3.429	97.66	4.621	4.782	103.48
4. Jumlah Kebutuhan Tenaga CPNS	Orang	1.876	0	0	3.250	22	0,67	3.295	0	0
5. Jumlah Pegawai yang Mutasi	Orang	720	885	122,92	720	1.151	159,86	1.072	858	80.03
6. Jumlah Pegawai yang Pensiun	Orang	82	108	131,71	522	462	88,51	549	577	105,10
7. Jumlah Penyelenggaraan Bimtek terkait Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Umum dan Perlengkapan dan	Bimtek	2	2	100	9	6	66,7	9	9	100



Organisasi dan Hubungan Masyarakat.											
8. Jumlah penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	Diklat/ Bimtek	2	1	50	5	4	80	6	6	100	
9. Prosentase penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	87,14	63,37	72,72	90	81,07	90,08	92.50	84.59	91.45	
10. Nilai BMN pada neraca Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut	Rp	46.047.331.8 83.767	130.375.273. 633.433	283,13 3	42.403.073.5 79.705	27.026.7 55.313.9 19	63,74	2,256,561,887 ,757	28,266,123 ,121,419	1,253	
11. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Perhubungan Laut	Rp	620.986.332. 124	1.605.754.55 8.169 258,58	258,58	58.208.694.1 28	75.055.153 .765	128,94	63,238,567,311	123,643,452 ,627	195.52	
12. Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan Administrasi dan Teknis	Dokumen	5	6	120	31	30	96,77	20	20	100	
13. Jumlah kegiatan Evaluasi / Monitoring / Pembinaan / Penyuluhan / Sosialisasi	Dokumen	15	19	126,67	76	63	82,89	27	25	92,59	
14. Jumlah Studi dan Kajian yang disusun	Studi/ Kajian	2	3	150	5	4	80	4	4	100	



15. Volume Gedung Kantor yang Fungsinya terpulihkan (Gedung)	M3	28.428	28.428	100	28.900	28.900	100	28,900	28,894	99.97
16. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perengkapan kantor	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
17. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/perengkapan kantor	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
18. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
19. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
20. Jumlah rancangan dan peraturan yg ditetapkan	Peraturan	14	39	278,57	28	28	100	18	25	138.89
21. Jumlah peraturan perundangan yang telah di sosialisasikan	Peraturan	14	16	114,28	10	10	100	10	7	70
22. Jumlah penyelesaian perkara	Perkara	4	6	150	13	11	84.61	7	5	71.43
23. Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Perjanjian	20	19	95	6	3	50	7	5	71.43



24. Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan dan Perjanjian dalam rangka Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral	Pertemuan/ Perjanjian	30	58	193,33	16	17	106,25	19	18	94.74
25. Jumlah kegiatan Pelayanan informasi bagi Masyarakat Umum	Kegiatan	15	16	106,67	6	6	100	6	5	83.33
26. Jumlah kegiatan Kehumasan dan Protokoler	Kegiatan	15	33	220	16	16	100	16	12	75

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 - 2017





Pada periode 2018 dan 2019 terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari yang awalnya (pada periode 2015-2017) sebanyak 26 Indikator, menjadi 36 Indikator sehingga disajikan pada Tabel II.1.2. berikut :

Tabel II.1.2. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2018-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1. Prosentase Peningkatan Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Laut yang Bersertifikat	%	80	98,96	123,70	90	96,40	107,11
2. Prosentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Hubla	%	80	80	100	100	100	100
3. Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Hubla (Skala Likert 1-5)	Nilai	4	4	100	4	4	100
4. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Ditjen Hubla	%	82,55	86,22	104	97	0	0
5. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen Hubla	%	80	71,45	89,3	90,50	89,98	99,43
6. Jumlah Dokumen dan Laporan yang Disusun terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	Dokumen	5	5	100	5	5	100
7. Jumlah Pembinaan, Sosialisasi, dan Koordinasi terkait SAKIP dan Dokumen Lainnya	Kegiatan	50	50	100	50	50	100
8. Jumlah Studi dan Kajian yang Disusun	Dokumen	2	4	200	2	2	100
9. Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Hubla yang Disusun	Dokumen	336	336	100	302	302	100
10. Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Sosialisasi di Bidang Keuangan	Kegiatan	3	3	100	6	6	100
11. Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keuangan	Kegiatan	10	9	90	6	6	100



INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
12. Jumlah Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek terkait Peningkatan Kompetensi	Kegiatan	8	8	100	8	10	125
13. Jumlah Penerbitan SK Mutasi/Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional	SK	4142	7282	175,81	412	6127	147,9
14. Prosentasi Jumlah Kasus Disiplin Pegawai yang Dapat Ditangani Sampai Selesai	%	50	72,26	122,26	100	100	100
15. Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan Yang Ditetapkan	Dokumen	20	10	50	10	9	90
16. Jumlah Peraturan Perundangan yang telah disosialisasikan	Dokumen	8	9	112	8	5	62,5
17. Jumlah Penyelesaian Perkara	Dokumen	5	7	140	5	2	40
18. Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	6	7	116	6	9	150
19. Jumlah Perjanjian, Kerjasama Bilateral, regional dan Multilateral	Dokumen	2	2	100	2	0	0
20. Jumlah Penyelenggaraan Pertemuan Dalam Rangka Kerjasama	Kegiatan	18	18	100	18	14	77,78
21. Persentase Penatausahaan Administrasi Perkantoran	%	100	82,33	82,33	100	93,05	93,05
22. Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Operasional Kerumahaan	%	100	85,24	85,24	100	85,73	85,73
23. Nilai BMN Pada Neraca Ditjen Perhubungan Laut	Rp	48.834.429.426.125	54.178.537.670.152	110,9	59.137.268.800.155	55,661,604,024,873	94,12
24. Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat	Kegiatan	4	5	125	5	5	100

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 – 2017



INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2018			2019		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
25. Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler	Kegiatan	14	17	121	14	16	114,29
26. Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Pemeliharaan Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Kegiatan	2	2	100	2	3	150
27. Jumlah Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi Terkiat RB	Kegiatan	4	4	100	4	4	100
28. Jumlah Dokumen RB yang Disusun	Kegiatan	4	4	100	2	2	100
29. Jumlah SDM Sesditjen Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	Orang	27	20	74,07	133	133	100
30. Jumlah Sistem dan Informasi di Lingkungan Sesditjen Hubla	Unit	1	1	100	1	1	100
31. Persepsi Publik Terkait Pelayanan Informasidi Sesditjen Hubla (1-10)	Nilai	9	8	88,88	9	8	88,89
32. Jumlah Dokumen SAKIP yang Disusun	Dokumen	5	5	100	5	5	100
33. Persentase Penyerapan Anggaran Sesditjen Hubla	%	80	87,12	108	91,09	94,40	103,63
34. Nilai Kinerja Anggaran Sesditjen Hubla	%	80	87,14	108,92	91,09	103,63	113,77
35. Nilai BMN Sesditjen Hubla	Rp	4.040.035.615 .382	9.832.434.50 0	96.73	3,938.416.805 .293	2.341.781.591 .776	59,46
36. Target PNBPN Sesditjen Hubla	Kegiatan	73.206.150.00 0	78.300.863.0 13	106,96	61.792.762.56 1	85.328.279.78 2	138,09

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 - 2017



Rencana, Alokasi dan Realisasi Kinerja Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019

1. Pada **Tabel II.1.3.** disampaikan perbandingan antara rencana kebutuhan anggaran, yang termuat di dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019, dengan alokasi anggaran yang diperoleh berdasarkan data DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada setiap tahunnya. Perbedaan alokasi anggaran ini dapat menyebabkan beberapa target kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis tidak dapat tercapai sepenuhnya.
2. Pada **Tabel II.1.4** disampaikan perbandingan antara alokasi anggaran (DIPA) dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019.





Tabel II.1.3. Perkembangan Alokasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015 - 2019

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Renstra	Alokasi Anggaran	%												
1.	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Setditjen Hubla	4.673,399	879,429		5.791,101	337,872		6.659,766	328,659		7.658,731	14,417		8.807,541	407,139	

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015- 2019

Tabel II.1.4. Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015-2019

(Dalam Ribu Rupiah)

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%									
1.	Belanja Pegawai												115.128.971.000	112.218.097.687	97,47	
2.	Belanja Barang												272.138.122.000	253.508.435.202	93,15	
3.	Belanja Modal												19.872.151.000	18.617.404.600	93,69	
	TOTAL												407.139.244.000	384.343.937.489	94,40	

Sumber: LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2015- 2019



Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menjadi isu strategis dan perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 diuraikan pada Tabel 1.4

Tabel II.1.5. Isu Strategis Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Alokasi Formasi CPNS Teknis dan Non Teknis • Pemeliharaan Kompetensi Pelaut PNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Pemanfaatan E-Planning Pada Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sistem informasi E-Persuratan sebagai Alat Bantu/Pedoman Untuk Pencatatan/Pemilahan Surat Masuk/Dossier, Mail Tracking, Proses Disposisi, Pembuatan/ Konsep Surat Keluar/Nota Dinas
4.	Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Integrasi Database Pembangunan • Infrastruktur Transportasi Laut Pengusulan Jenis Barang Pada Proses Pengadaan Melalui E-Katalog • Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Aplikasi Informasi Eksekutif Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
5.	Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Familiarisasi / Hearing Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Dengan Stakeholder
6.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Guna kelengkapan dokumen administratif dalam pelaksanaan tata hubungan kerja antar unit/sub unit dalam satu organisasi, akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis dan SOP pada UPT Ditjen Hubla
7.	Manajemen Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Berjenjang (Eselon I S/D Eselon IV)
8.	Kinerja dan Dampak Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penggunaan media sosial untuk mensosialisasikan / mempublikasikan kinerja Ditjen Hubla kepada masyarakat



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020

Tabel II.1.6 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.



No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Memperkuat moderasi beragama; dan 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 2) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 3) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dirumuskan tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 - 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen teknis di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2024 yang telah ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 disusun setelah DIPA Tahun 2024 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memuat pernyataan Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:



Tabel II.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK 6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	10
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	30
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,70
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	20
		IKK 10	Pencapaian target penetapan status penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	15



Tabel II.2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	10
		IKK 2	Peningkatan Kompetensi Sdm Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	30
		IKK 6	Nilai Akip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82
		IKK 7	Nilai Maturitas Spip Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,70
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	20
		IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Status BMN	15



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.
2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja.



4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada tinjauan ucxlang RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Terhadap target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja Program



di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja atau dokumen PK, di dalam dokumen PK menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja.





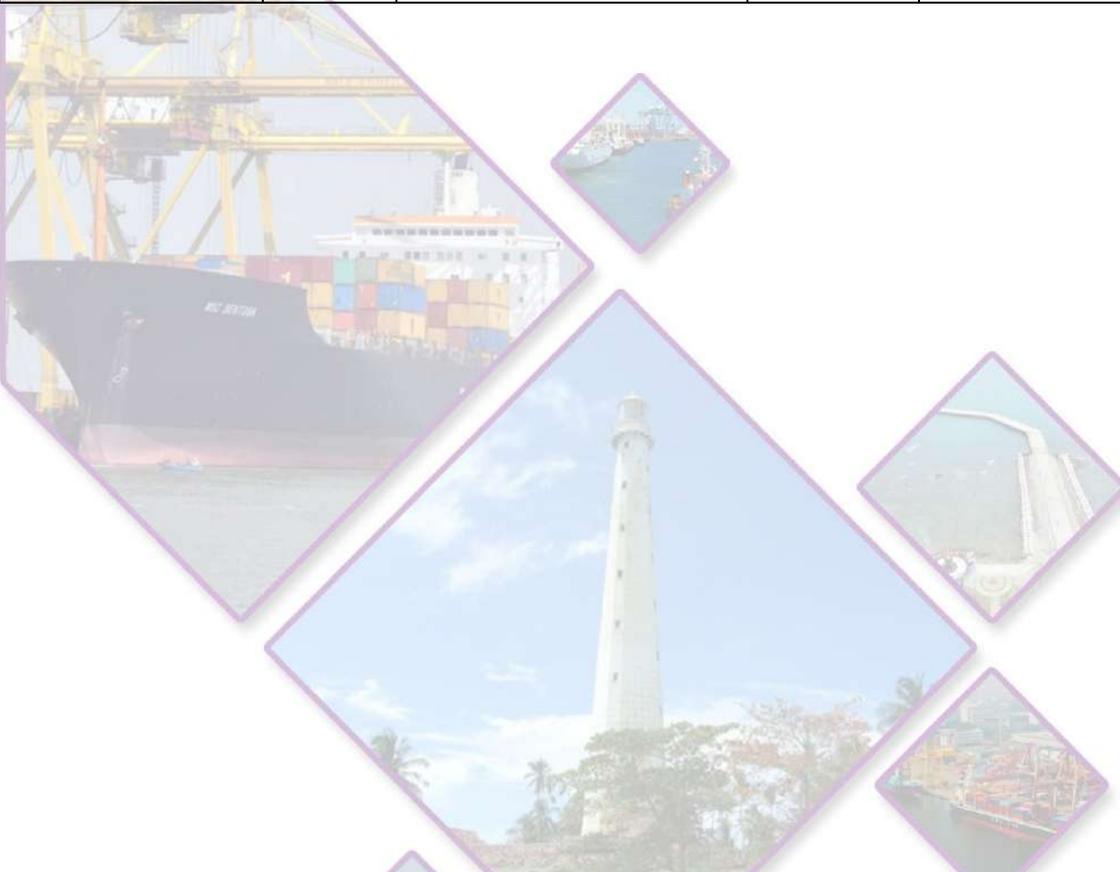
B. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Tabel III.2.1 Pencapaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SK	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	10	0	0	7,14	7.14	7.14	71.4
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400	0	192	330	378	378	95,5
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90	90	90	90	90	90	100
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4	4	4	4	4	4	100
		IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	30	7	13	23	30	30	100
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82	0	0	80,82	80,82	80,82	98,56
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	0	3,835	3,835	3,835	3,835	127,83



		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,70	16,19	43,17	58,65	97,63	97,63	99,93
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	20	6	9	14	20	20	100
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	15	0	8	15	15	15	100





C. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024

1. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen Dan Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

a. **Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan.**

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1)**

Tabel III.3.1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	10	0	0	7,14	7.14	7.14	71.4

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2024 sebesar 10%. Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi dikarenakan belum ada penetapan dari Kemenpan RB mengenai jumlah formasi untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik Calon Pegawai Negeri Sipil, P3K maupun dari Pola Pembibitan, sehingga prosentase terhadap target 0%.

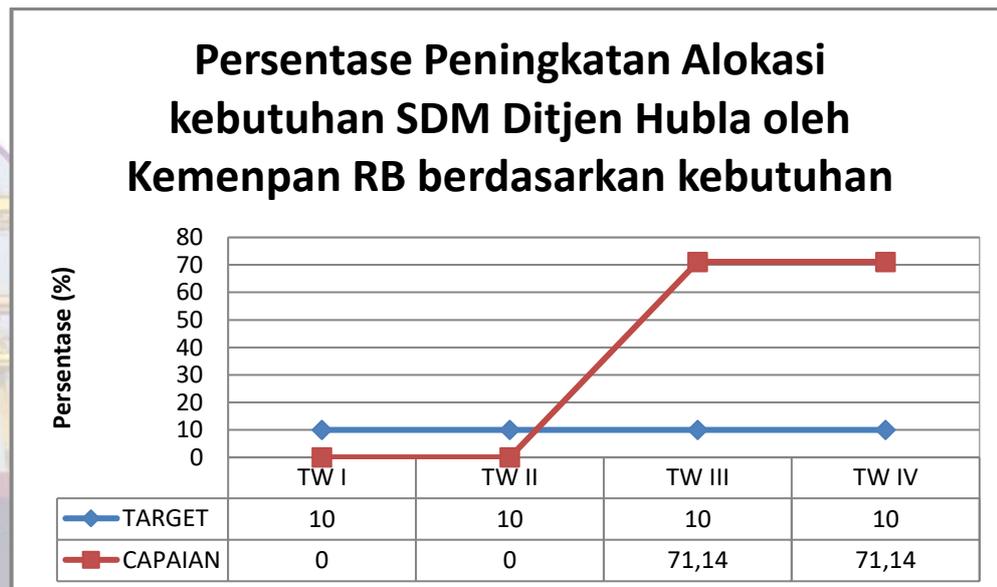
Pada Triwulan II belum terdapat realisasi dikarenakan belum adanya penerimaan pegawai baik dari CPNS atau PPPK, sehingga prosentase terhadap target 0%. Proses penerimaan CPNS dan PPPK baru akan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan September).

Pada Triwulan III telah diajukan usulan sebanyak 11.443 pegawai yang terdiri dari 6.970 usulan CPNS dan 4.473 orang usulan PPPK, sedangkan yang disetujui oleh Kemenpan RB adalah sebanyak 5.290 pegawai yang terdiri dari 817 orang CPNS dan 4.473 orang PPPK. Proses penerimaan pegawai untuk CPNS sedang dilakukan pada bulan September s.d Oktober 2024.



Pada Triwulan IV bulan Oktober s.d November telah dilaksanakan penerimaan CPNS dan pada bulan November s.d Desember sedang dilaksanakan penerimaan PPPK. Total realisasi dari Triwulan I s.d Triwulan IV yaitu 7,14%, sehingga prosentase terhadap target kinerja adalah 71,4%.

Grafik III.3.1 Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan



Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya - upaya untuk Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut:

- a) Melakukan Verifikasi Eksisting terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- b) Mengalokasikan dari hasil jalur pola pembibitan yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c) Mengalokasikan dari hasil jalur Politeknik Keuangan Negara STAN yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1) Kesatu (1) :

Adapun realisasi kinerja Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan setiap tahun telah naik persentasenya terhadap target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian terhadap target setiap tahunnya didukung peran aktif dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan alokasi kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan.



**Tabel III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020
Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	Target	9	9	9	9	10
		Realisasi	0	0,09	0	4,38	7,14
		Kinerja (%)	0	10	0	48,67	71,4

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan (IKK1) Kesatu (1) :

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan untuk target tidak terdapat perubahan dan realisasinya terdapat peningkatan setiap tahun, sehingga jumlah kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meningkat.

Tabel III.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu (1)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan Transportasi Laut Nasional	%	Target	9	9	9	9	9
		Realisasi	0	0,09	0	4,38	7,14
		Kinerja (%)	0	10	0	48,67	79,33

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



b. Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2) Kedua (2) :

Tabel III.3.4 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400	0	192	330	378	378	95,5

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2024 sebesar 400 sertifikat. Terlihat pada Triwulan I belum ada realisasi dikarenakan belum ada kegiatan terkait Pendidikan dan pelatihan yang menggunakan anggaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 0%.

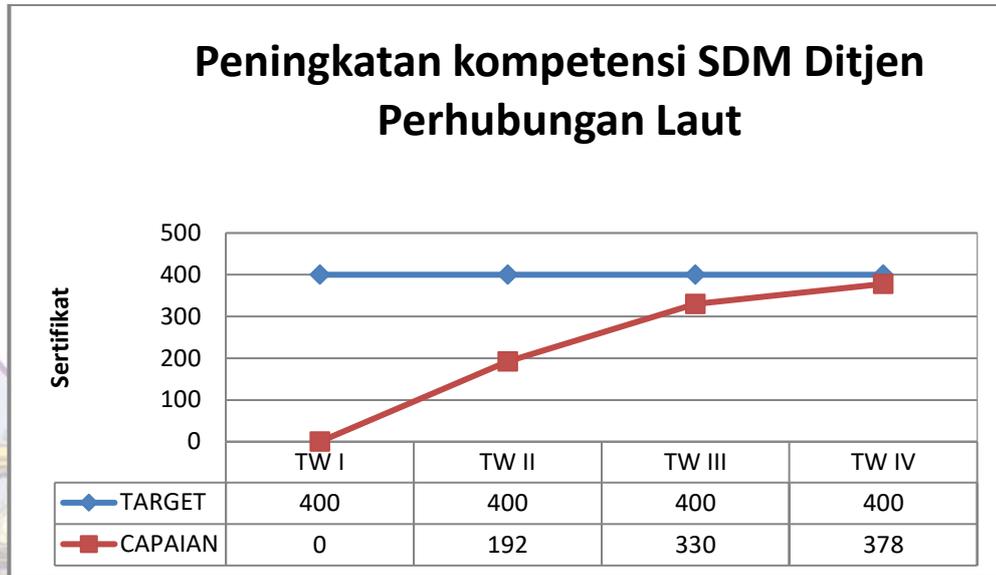
Pada Triwulan II terdapat realisasi sebanyak 192 sertifikat dengan telah diselenggarakannya diklat *Basic Safety Training (BST)*, *Security Awareness Training (SAT)*, *Advance Fire Fighting (AFF)* sebanyak 2 angkatan, sehingga prosentase pencapaian terhadap target 48%.

Pada triwulan III terdapat penambahan realisasi sebanyak 138 sertifikat dengan telah dilaksanakannya diklat TOT sebanyak 2 angkatan (60 sertifikat) Diklat TOE sebanyak 1 angkatan (30 sertifikat) dan diklat DPKN Angkatan I (48 sertifikat), sehingga realisasi pada triwulan III adalah sebanyak 330 sertifikat atau 82,5% dari target.

Pada triwulan IV terdapat penambahan realisasi sebanyak 48 sertifikat yaitu diklat DPKN Angkatan II (48 sertifikat), sehingga realisasi pada triwulan IV adalah sebanyak 378 sertifikat atau 94,5% dari target.



Grafik III.3.2 Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut



Tabel III.3.5 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi Laut Bersertifikat (Aparatur Teknis)

NO	DIKLAT	PEMBUKAAN	PENUTUPAN	SERTIFIKAT	KETERANGAN
1.	Keahlian dan Ketrampilan Pelaut Angkatan I dan 2 @32 orang: - <i>Basic Safety Training (BST)</i> - <i>Security Awareness Training (SAT)</i> <i>Advance Fire Fighting (AFF)</i>	16 April 2024	20 April 2024	192	Terealisasi di Triwulan II
2.	Diklat Perwira Kapal Negara (DPKN) Angkatan I Perwira Dek : 24 orang, Perwira Mesin : 24 orang	22 April 2024	13 September 2024	48	Direncanakan Selesai di Triwulan III
3.	Diklat Perwira Kapal Negara (DPKN) Angkatan II Perwira Dek : 24 orang, Perwira Mesin : 24 orang	11 Juni 2024	19 Oktober 2024	48	Direncanakan Selesai di Triwulan IV
4.	Training of Trainer (TOT IMO Model Course 6.09) Angkatan I dan II @30 orang	24 Juni 2024	2 Juli 2024	60	Direncanakan Selesai di Triwulan III
5.	Training of Examination (TOE IMO Model Course 3.12)	29 Juli 2024	5 Agustus 2024	30	Direncanakan Selesai di Triwulan III

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan



2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2) Kedua (2) :

Adapun realisasi kinerja Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan belum ada kegiatan terkait Pendidikan dan pelatihan yang menggunakan anggaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta adanya recovery dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada realisasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ditjen Perhubungan Laut.

Tabel III.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	Target	1900	1900	300	300	400
		Realisasi	1408	889	300	386	378
		Kinerja (%)	74,11	46,79	100	128,67	94,5

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut (IKK 2) Kedua (2) :

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.



Tabel III.3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (2)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	Target	1900	1900	1900	1900	1900
		Realisasi	1408	889	300	386	378
		Kinerja (%)	74,10	46,78	15,78	20,31	19,89

Sumber data : Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

c. Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3)

Tabel III.3.8 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK 3 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90	90	90	90	90	90	100

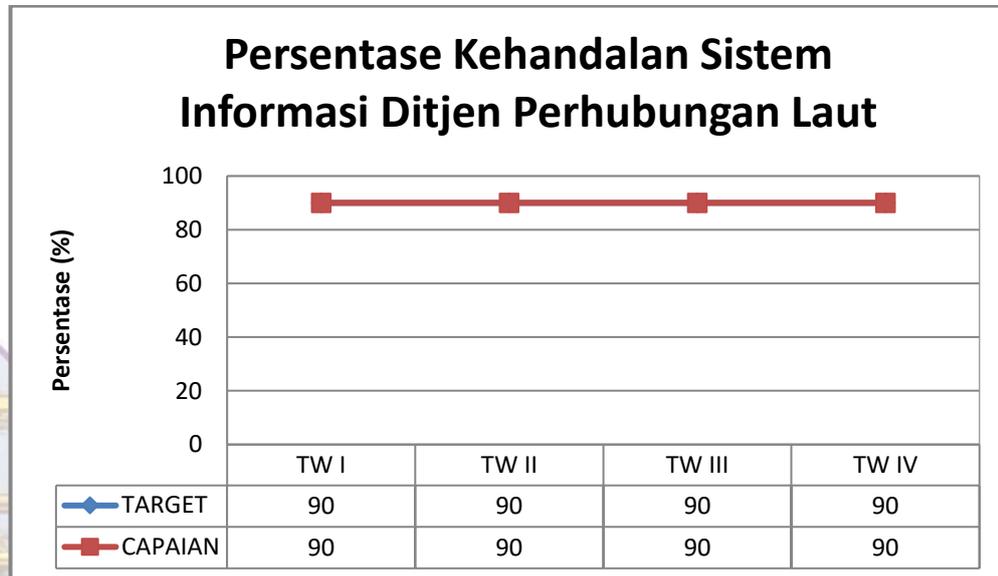
Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun Sesuai dengan target tahun 2024 nilai rata-rata kehandalan sistem informasi Ditjen Hubla Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 90% dengan indikator pelayanan 100% sistem bisa/dapat diakses 24 jam dalam sehari 7 hari dalam seminggu untuk aplikasi SEHATI, SIRANI dan Portal Hubla.



Grafik III.3.3

Grafik III.3.3 Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut



Dalam suatu sistem yang handal harus memenuhi 4 prinsip yaitu :

- a) Ketersediaan (*availability*).
- b) Keamanan (*security*).
- c) Dapat dipelihara (*maintainability*).
- d) Integritas (*integrity*).

Untuk mendukung kehandalan sistem informasi dengan rutin melakukan pengetesan keamanan sistem, melakukan pemuktahiran teknologi, *updating* dan *patching software* dan system operasi, perawatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3) :

Adapun realisasi kinerja Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19, sedangkan untuk Tahun 2020, Tahun 2021 Tahun 2023 dan tahun 2024 sesuai dengan Target yang ditentukan karena sistem informasi melalui portal hubla.dephub.go.id dapat di akses 24 jam



Tabel III.3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	82	82	85	85	90
		Realisasi	97	82	83	85	90
		Kinerja (%)	118,29	100	97,65	100	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut (IKK 3) Ketiga (3) :

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan terdapat terdapat Pengembangan yang baru selesai di Bulan Desember 2023 dan terkait Keandalan baru bisa di liat di Tahun 2024.

Tabel III.3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga (3)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	82	84	86	88	90
		Realisasi	97	82	83	85	90
		Kinerja (%)	118,29	97,61	96,51	96,59	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



d. Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :

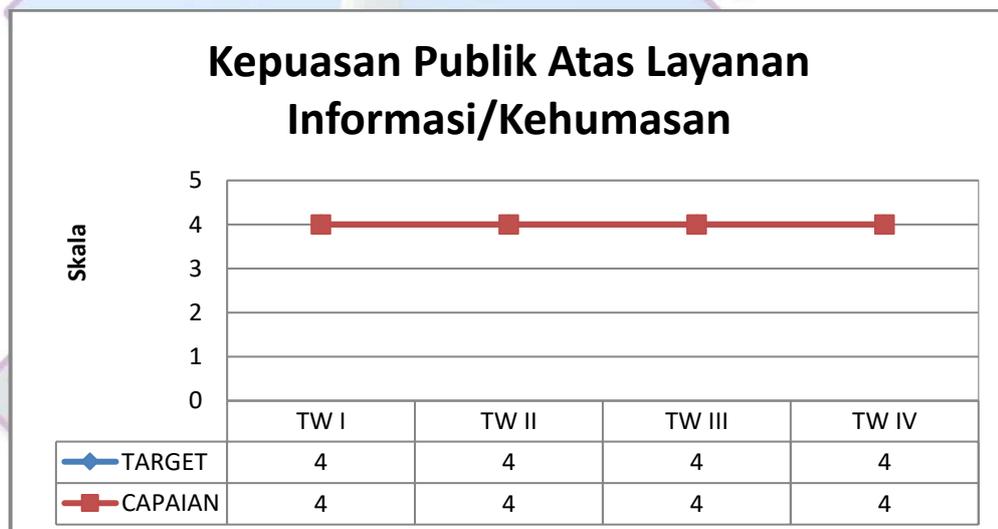
Tabel III.3.11 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.4 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	Skala	4	4	4	4	4	4	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2024 Indeks kepuasan publik sebesar 4 dengan nilai indeks maksimal sebesar 5. Terlihat pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, tercapai hasil perhitungan pada Skala 4 dengan jumlah rata-rata responden 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan dalam mengakses permohonan informasi dan data terkini yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada para pemohon informasi.

Grafik III.3.4 Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan





2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :

Adapun realisasi kinerja Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahun pencapaiannya sesuai dengan target yg telah ditetapkan indeks sebesar 4 skala dengan jumlah rata-rata responden pada masing-masing Triwulan sebesar 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Portal hubla.dephub.go.id terdapat realisasi sebesar 4 (empat) sehingga prosentasi capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel III.3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan	Skala	Target	4	4	4	4	4
		Realisasi	4	4	4	4	4
		Kinerja (%)	100	100	100	100	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan (IKK 4) Keempat (4) :

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi /Kehumasan untuk target tidak terdapat perubahan Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik).



Tabel III.3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat (4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/ Kehumasan	Skala	Target	4	4	4	4	4
		Realisasi	4	4	4	4	4
		Kinerja (%)	100	100	100	100	100

Sumber data : Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

e. Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut.

- 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK 5) Kelima (5) :**

Tabel III.3.14 Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.5 Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	30	7	13	23	30	30	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2024 sebanyak 30 Perjanjian Kerja sama. Pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 7 Perjanjian Kerja Sama sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 23%.

Pada Triwulan II terdapat penambahan 5 perjanjian Kerjasama sehingga sampai dengan Triwulan II total realisasi perjanjian Kerjasama sebesar 13 perjanjian sehingga persentase kinerja terhadap target sebesar 44,33%.

Pada Triwulan III terdapat penambahan 10 perjanjian Kerjasama sehingga sampai dengan Triwulan III total realisasi perjanjian Kerjasama sebesar 23 perjanjian sehingga persentase kinerja terhadap target sebesar 76.66%.



Pada Triwulan IV terdapat penambahan 7 perjanjian Kerjasama dengan total realisasi perjanjian Kerjasama sebesar 30 perjanjian sehingga presentase kinerja terhadap target sebesar 100%

Adapun 30 Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dengan PT Mitra Kasih Perkasa Pada Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Nomor AL.102/1/1/UPP.NPE/2024 dan 227.PBS.001/MKP-TIX/PKS/LGL-SK/1/24 tanggal 25 Januari 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dengan PT Easybook Teknologi Indonesia tentang Optimalisasi Layanan Kapal Penumpang Berbasis Sistem Informasi Elektronik (*E-Ticketing*) Oleh PT Easybook Teknologi Indonesia pada wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Nomor AL.102/1/2/UPP.NPE/2024 dan J147.20/DIR.PT.ETI/II/2024 tanggal 29 Januari 2024;
3. Perjanjian Sewa antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa Ditjen Hubla Kemenhub Dengan PT Easybook Teknologi Indonesia tentang Sewa Barang Milik Negara (BMN) Berupa Sebagian Gedung Terminal /Pelabuhan Sanur Bali Nomor PL.107/1/12/KSOP.BNA/2024 dan J144.13/DIR-PT.ETI/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;
4. Nota Kesepakatan antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida dan Pemerintah Kabupaten Klungkung tentang Optimalisasi Layanan Kapal Penumpang Berbasis Sistem Informasi Elektronik (*E-Ticketing*) Oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung Di Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida di Kabupaten Klungkung Nomor AL.102/1/6/UPP.NPE/2024 dan 100.3.7.1/02/NOTAKESEPAKATAN/ B.PEM.KES/2024 tanggal 7 Februari 2024;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla kemenhub dengan Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Berbagi Pakai Data dan Informasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Nomor HK.201/01/01/DV-24 dan PKS-1/KS.01.01/II/BSN-2024 tanggal 12 Februari 2024;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Sewa antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa Ditjen Hubla Kemenhub dengan PT Easybook Teknologi Indonesia tentang Optimalisasi Layanan Kapal Penumpang Berbasis Sistem Elektronik (*E-Ticketing*) Oleh PT Easybook Teknologi Indonesia Di Indonesia Sanur Bali Nomor PL301/1/3/KSOP.BNA/2024 dan J164.06/DIR-PT.ETI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
7. Adendum kelima Perjanjian Konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas I Banten Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Krakatau Bandar Samudera tentang Kegiatan Pengusahaan di Bidang Penyediaan dan / atau



Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Cigading Nomor HK.107/2/2/KSOP.BTn-16 dan HK.02.01/052.01.DU/XI/2016 tanggal 21 Maret 2024;

8. Perjanjian Kerja Sama antara Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas dengan PT. PGAS Solution Area Semarang tentang Pelayanan Jasa Koneksi Data Vessel Traffic Services (VTS) Semarang oleh Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas Nomor HK.201/1/8/DNG.TG.EMAS/2024 dan 00420.Prn/HK.03/PPOSMG/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
9. Perjanjian Kerjasama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang dengan PT Easybook Teknologi Indonesia tentang Optimalisasi Layanan Kapal Penumpang Berbasis Sistem Informasi Elektronik (*E-Ticketing*) oleh PT. Easybook Teknologi Indonesia di Terminal Gili Trawangan Pada Pelabuhan Pemenang Nomor PR.203/01/05/KUPP.PMG-2024 dan Nomor J213.06/DIR-PT.ETI/V/2024 tanggal 28 April 2024;
10. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tentang Jasa Survei, Sertifikasi Klasifikasi, Konsultasi dan Supervisi untuk Pemeliharaan Kapal Negara Kenavigasian Nomor HK.201/3/8/DJPL/2024 dan B.08412/HK.503/KI-24 tanggal 3 Mei 2024;
11. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo dengan PT. Easybook Teknologi Indonesia tentang Optimalisasi Layanan Kapal Penumpang Berbasis Sistem Informasi Elektronik (*E-Ticketing*) oleh PT. Easybook Teknologi Indonesia di Terminal Penumpang Waterfront di Pelabuhan Labuan Bajo Nomor HK.201/4/1/KSOP.LBJ/2024 dan J214.06/DIR-PT.ETI/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
12. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang Pertukaran dan Pemanfaatan data dan / atau informasi untuk meningkatkan pengawasan pengusaha yang menggunakan transportasi laut dalam rangka kepentingan perpajakan Nomor : PRJ-9/PJ/2024 dan Nomor : HK.201/4/18/DJPL/2024 tanggal 31 Mei 2024;
13. Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Kegiatan Pengoperasian Alih Muat Antar Kapal (*Ship to Ship Transfer*) di Perairan Muara Jawa, di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Nomor : HK.201/1/5/UPP/KSBJ/2024 dan Nomor : SPK/KUPP/PTB/011/VI-2024 Tanggal 11 Juni 2024;
14. Adendum Kedua atas Perjanjian Konsesi Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Siam Maspion di Pelabuhan Gresik antara Kantor KSOP Kelas II Gresik Ditjen Hubla kemenhub RI dengan PT Siam Maspion Terminal Nomor HK.201/1/6/KSOP.Gsk-2024 dan Nomor 04/PB/KSOP GSK-SMT/GEN/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2024;



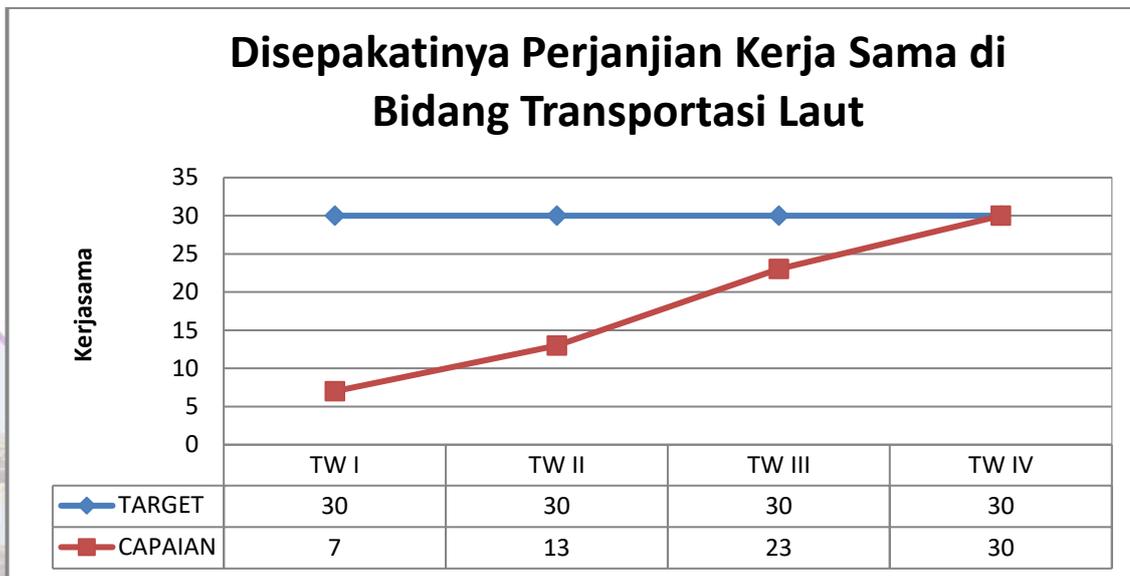
15. Perjanjian Konsesi antara Kantor KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin Ditjen Hubla Kemenhub RI dengan PT Dua Samudera Perkasa tentang Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Tanjung Pemancingan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor HK.201/01/07/KSOP.KBBI/2024 dan Nomor 034/DSP-KSOP/VII/2024/STS.TJP Tanggal 26 Juli 2024;
16. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RI tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Berupa Tanah Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Untuk Pembangunan Pelabuhan Salakan Nomor 03/NPHD/2024 dan Nomor HK.201/7/3/DJPL/2024 Tanggal 6 Agustus 2024;
17. Perjanjian Konsesi antara Kantor UPP Kelas II Weda Ditjen Hubla Kemenhub dengan PT Weda Bay Port tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Lelilef Nomor AL.308/1/22/UPP.WED/2024 dan Nomor WBP-24222 Tanggal 6 Agustus 2024;
18. Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelita Indonesia Djaya dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Nomor 08.19/PKS/DIR/001/100/2024 dan Nomor HK.201/1/6/DA-2024 Tanggal 19 Agustus 2024;
19. Adendum I Perjanjian Konsesi antara Kantor KSOP Kelas II Marunda Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan dengan PT Karya Citra Nusantara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 dan Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Tanggal 20 Agustus 2024;
20. Perjanjian Konsesi antara Kantor UPP Kelas II Tanjung Redeb Ditjen Hubla Kemenhub RI dengan PT Mitra Samudera Kreasi tentang Pengusahaan pada Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Muara Pantai Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor UM.002/17/13/KSOP BPN 2023 dan Nomor 026/ILSS/LEG/AGR/III/2023 Tanggal 30 Agustus 2024;
21. Perjanjian antara Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RI dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan KM. Kelud sebagai Akomodasi Terapung di Pelabuhan Malahayati Dalam Rangka Mendukung Pekan Olahraga Nasional XXI Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor TH.09.04-01/KNP/2024 Tanggal 4 September 2024;
22. Perjanjian Konsesi antara Kantor KSOP Kelas III Talang Duku Ditjen Hubla KemenhubRI dengan PT Wahyusandra Indah tentang Kegiatan Pengusahaan Kepelabuhanan Pada Terminal Peti Kemas Muaro Jambi di Pelabuhan Talang Duku Nomor AL.001/1/1/KSOP.TLD-2024 dan Nomor WSI-2024.9.98 Tanggal 5 September 2024;



23. Adendum Nomor 1 Perjanjian Konsesi antara Kantor KSOP Kelas I Pontianak Ditjen Hubla Kemenhub dengan BUP PT Indo Kontainer Sarana di Pelabuhan Pontianak Nomor PP.008/1/6/KSOP.PTK-18 dan Nomor 007/IKS/III/2018 Tanggal 9 September 2024;
24. Kesepakatan Bersama antara Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemenkumham, TNI dan Bakamla tentang Standar Operasional Prosedur KOordinasi Antar-Instansi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Nomor PJ-MHB 7 TAHUN 2024 Tanggal 14 Oktober 2024;
25. Perjanjian Konsesi antara Kantor UPP Kelas II Weda dengan PT Pelabuhan Samudera Nusantara tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Samudera Nusantara di Pelabuhan Weda Nomor AL.308/2/9/UPP.WED-24 dan 001/PKS/PSN-KUPPIIWeda/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024;
26. Perjanjian Konsesi antara Kantor UPP Kelas III Kolonedale Ditjen Hubla dengan PT Satya Amerta Havenport tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Satya Amerta Havenport di Pelabuhan Kolonedale Nomor AL.001/189/13/UPP.KDL-2024 dan Nomor 001/SAH-DirjenHubla/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024;
27. Perjanjian Konsesi antara Kantor UPP Kelas II Tana Paser dengan PT Rugaya Nusantara Jaya tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Rugaya Nusantara Jaya di Pelabuhan Tana Paser Nomor HK.201/1/9/UPP.TPR-2024 dan Nomor 021/RNJ-BPP/PK/XI/2024 Tanggal 6 November 2024;
28. Perjanjian Kerja Sama antara Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok dengan PT PLN (Persero) tentang Penggunaan Perairan di Terminal Khusus PLTU Lombok FTP-2 (2x50 MW) Sambela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor HK.303/01/01/UPP.LLO/2024 dan Nomor 0005.MoU/KIT.02.01/F43000000/2024 Tanggal 6 November 2024;
29. Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo dengan PT Kutai Timber Indonesia tentang Pemanfaatan Tanah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 00022 Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL.302/195/16/KSOP.Pbl/2024 dan 1621/XII/KTIP/S.PERJ/2024 Tanggal 2 Desember 2024;
30. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum tentang Penguatan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer dan Koperasi Nomor HK.201/13/13/DJPL2024 dan Nomor AHU-HH-04.02.03 tanggal 12 Desember 2024.



Grafik III.3.5 Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut



2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK5) Kelima (5) :

Adapun realisasi kinerja Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal sehingga transportasi laut di Kementerian Perhubungan Khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berjalan dengan baik

Tabel III.3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	Target	11	12	21	26	30
		Realisasi	11	27	27	26	30
		Kinerja (%)	100	225	128	100	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut (IKK 5) Kelima (5)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut untuk target tidak terdapat perubahan.

Tabel III.3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima (5)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	Target	12	16	21	26	30
		Realisasi	11	27	27	26	30
		Kinerja (%)	91,66	168,75	128,57	100	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

f. Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6) :

Tabel III.3.17 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82	0	0	80,82	80,82	80,82	98,56

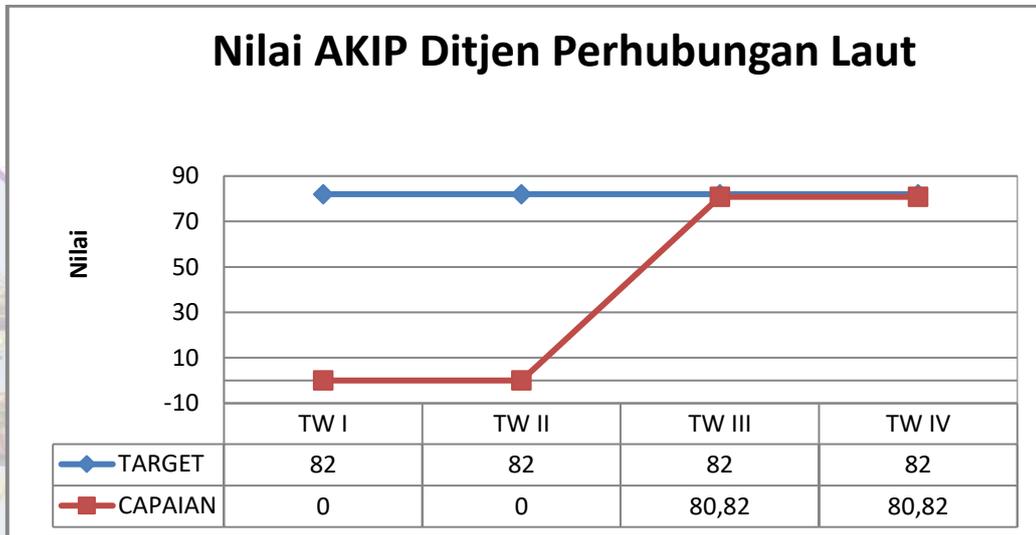
Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Untuk Tahun 2024 target dari Nilai AKIP sebesar 82 Nilai. Terlihat pada Triwulan I dan Triwulan II tidak terdapat realisasi karena belum ada Evaluasi Penilaian dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sehingga Persentase Kinerja sebesar 0%.



Pada Triwulan III telah dilaksanakan penilaian dokumen SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan menghasilkan nilai 80,82 sehingga prosentase kinerja sebesar 98,56 %.

Grafik III.3.6 Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut



Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 yang meliputi Komponen/Sub Komponen/Kriteria sebagai berikut:

Tabel III.3.18 Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24,45
2.	Pengukuran Kinerja	24,12
3.	Pelaporan Kinerja	12,38
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	19,88
5.	Capaian Kinerja	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80,82
	Predikat	A (Sangat Baik)



2) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6):**

Adapun realisasi kinerja Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut setiap tahun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi hal ini akan dilakukan fokus dalam perbaikan setiap tahunnya agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel III.3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	82	85	85	80	82
		Realisasi	81,41	75,92	80,42	80,79	80,82
		Kinerja (%)	95,77	89,32	94,61	100,98	98,56

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 6) Keenam (6) :**

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut untuk target tidak terdapat perubahan dan realisasinya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini menjadi perhatian dan dilakukan perubahan agar realisasi terhadap target yang telah ditetapkan sesuai.

Tabel III.3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keenam (6)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	85	86	88	89	90
		Realisasi	81,41	75,92	80,42	80,79	80,82
		Kinerja (%)	95,77	88,27	91,38	90,77	89,8

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



g. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 7)

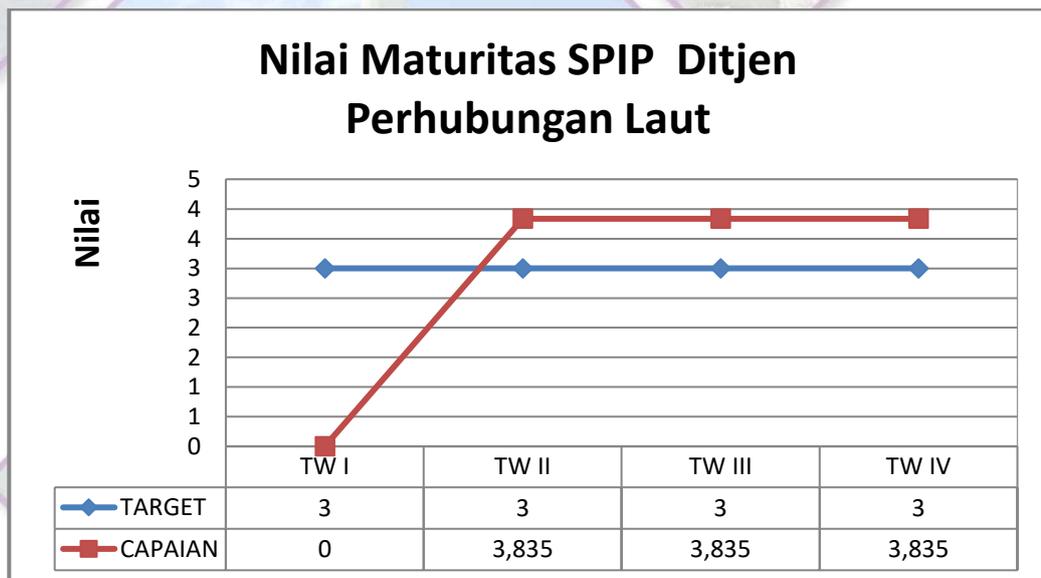
Tabel III.3.21 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.7 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	0	3,835	3,835	3,835	3,835	127,83

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk Tahun 2024 target dari Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut sebesar 3 Nilai. Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena belum ada evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, sehingga Persentase Kinerja sebesar 0%, sedangkan pada Triwulan II sudah terdapat realisasi sebesar 3,835 dengan presentasi terhadap kinerja sebesar 1237,83%. Dimana dengan nilai maturitas “terdefinisi” maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum meunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi.

Grafik III.3.7 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut





Tabel III.3.22 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000
2.	Struktur dan Proses	2	0,905
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,930
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3	3,835

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK)

Adapun realisasi kinerja Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dan dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya hal ini tersirat pada Tahunnya setelahnya mencapai target yang telah di tetapkan, hal ini di dukung oleh masing – masing sub sektor di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel III.3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	3	3	3	3	3
		Realisasi	2,95	2,96	3,578	3,486	3,835
		Kinerja (%)	98,33	98,67	119,26	116,2	127,83

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut (IKK 7)

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketujuh (7)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	Target	3	3	3	3	4
		Realisasi	2,95	2,96	3,578	3,486	3,835
		Kinerja (%)	98,33	98,66	119,26	116,2	95,875

Sumber data : Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

h. Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8)

Tabel III.3.25 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.8 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,70	16,19	43,17	58,65	97,63	97,63	99,93

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 8: Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2024 sebesar 97,70% yang merupakan hasil penyesuaian dari realisasi persentase daya serap Ditjen Perhubungan Laut tahun 2023. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi anggaran sebesar 16,19%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 31 Maret 2024, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 16,57%. Terlihat pada Triwulan II terdapat realisasi anggaran sebesar 43,17%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 Juni 2024, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 44,19%.

Terlihat pada Triwulan III terdapat realisasi anggaran sebesar 458,65%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 30 September 2024, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 60,03%.



Terlihat pada Triwulan IV terdapat realisasi anggaran sebesar 97,63%, data tersebut berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per 16 Januari 2024, sehingga prosentase kinerja terhadap target sebesar 99,93%. Masih terdapat sisa sampai akhir periode Desember untuk melihat prosentase daya serap Ditjen Perhubungan Laut.

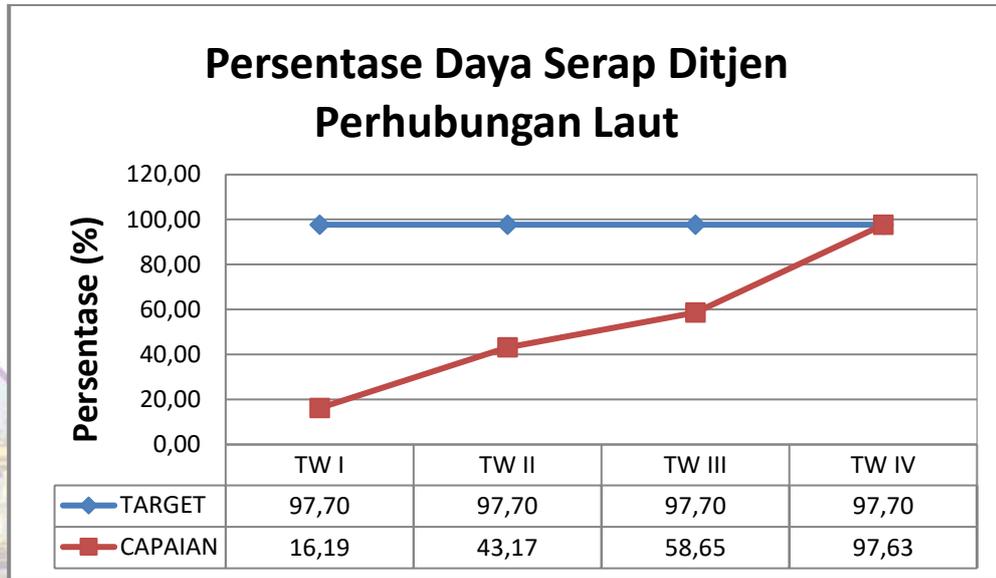
Adapun realisasi bulanan dibandingkan dengan target adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.26 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut Perbulan

Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut					
Satuan	Target 2024	Perbandingan Target dan Realisasi Bulanan			
		Bulan	Target	Realisasi	Kinerja
%	97,70	Januari	3,25	3,08	94,77%
		Februari	8,02	8,96	111,72%
		Maret	13,95	16,19	116,06%
		April	25,15	25,40	100,99%
		Mei	30,86	34,99	113,38%
		Juni	38,15	43,17	113,16%
		Juli	46,67	50,83	108,91%
		Agustus	52,46	58,20	110,94%
		September	58,77	58,65	99,79%
		Oktober	67,85	70,81	104,36%
		November	75,90	76,04	100,18%
		Desember	97,70	97,63	99,93%



Grafik III.3.8 Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut



2) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8) Kedelapan (8) :**

Adapun realisasi kinerja Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada Daya Serap masing di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel III.3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	95,37	93,98	96,30	97,4	97,70
		Realisasi	95,98	96,29	96,97	98,01	97,63
		Kinerja (%)	100,64	102,46	100,69	100,62	99,93

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut (IKK 8) Kedelapan (8) :**

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut untuk target tidak terdapat perubahan dan realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena adanya Optimalisasi Penyerapan Anggaran UPT/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut.

Tabel III.3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedelapan (8)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	Target	93,03	93,15	93,23	93,36	93,50
		Realisasi	95,98	96,29	96,97	98,01	97,93
		Kinerja (%)	103,17	103,37	104,01	104,98	104,73

Sumber data : OMSPAN dan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

i. Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut.

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :**



Tabel III.3.29 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKK.9 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut	Konsep Peraturan	20	6	9	14	20	20	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target Tahun 2024 sebanyak 20 Peraturan. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 3 Rancangan Peraturan Menteri, 2 Rancangan Keputusan Menteri dan 1 Rancangan Keputusan Dirjen. Sehingga prosentase pencapaiannya sebesar 30% belum mencapai target yang telah ditetapkan karena masih dalam proses penyusunan.

Sedangkan pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 3 Rancangan Peraturan Menteri, sehingga pencapaian sampai dengan Triwulan II terdapat 9 Konsep Peraturan dan prosesntase pencapaiannya terhadap target sebesar 45%.

pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 5 Rancangan Peraturan Menteri, sehingga pencapaian sampai dengan Triwulan III terdapat 14 Konsep Peraturan dan prosesntase pencapaiannya terhadap target sebesar 70%.

Adapun pada Triwulan I sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara;
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi (Harmonized System Of Survey and Certification/HSSC);
- Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan;
- Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Informasi Keselamatan Pelayaran
- Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi (SEHATI);
- Pembahasan *draft* surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Kriteria Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*), Perusahaan Induk (*Holding Company*), Atau Perusahaan Seinduk (*Sister*



Company) Yang Dapat Diberikan Pelayanan Pada Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

Pada Triwulan II sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Kode Simpul Transportasi Nasional;
- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Pelayaran Rakyat;
- c) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Standar Kelaiklautan Kapal bagi Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel*) Berbendera Indonesia.

Pada Triwulan III sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia;
- c) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
- e) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Satuan Poin dan Jenis Pelanggaran terhadap Kapal yang Melakukan Pelanggaran di Bidang Pelayaran;

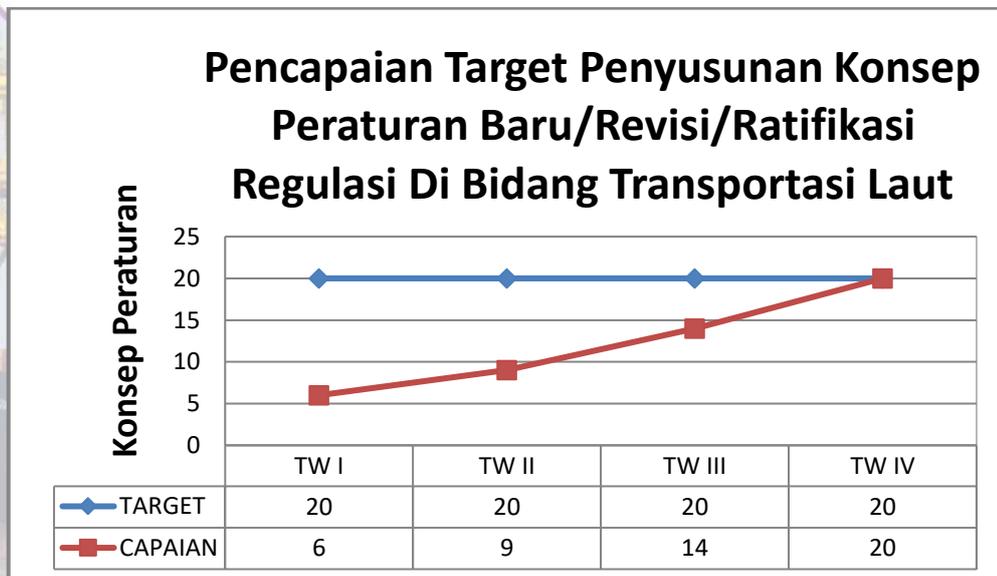
Pada Triwulan IV sedang dilakukan penyusunan beberapa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
- b) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Tata Cara Pengawasan dan Sanksi Denda Administrasi;
- c) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Penyijilan, Pengawasan Kapal, dan Dokumen Pelaut;
- d) Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan (RKM) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e) Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kajian Kelayakan Lokasi Pembangunan Laut Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kajian



- Kelayakan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Baru atau Pengembangan Terminal Baru Prakarsa Badan Usaha Pelabuhan Melalui Skema Konsesi;
- f) Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Jasa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut).

Grafik III.3.9 Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/ Revisi/ Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut



- 2) **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :**

Adapun realisasi kinerja Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.



Tabel III.3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pencapaian Target	Jumlah	Target	10	10	14	14	20
Penyusunan Konsep		Realisasi	10	23	14	14	20
Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut		Kinerja (%)	100	230	100	100	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut (IKK 9) Kesembilan (9) :

Adapun berdasarkan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Pencapaian Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut untuk target di Tahun 2023 di lakukan Reviu pada target Perjanjian Kinerja dikarenakan terdapat perubahan anggaran.

Tabel III.3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesembilan (9)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pencapaian Target	%	Target	10	12	14	17	20
Penyusunan Konsep		Realisasi	10	23	14	14	20
Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut		Kinerja (%)	100	191,66	100	82,35	100

Sumber data : Bagian Hukum dan KSLN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



j. Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target PK Revisi Tahun 2024 Pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla (IKK 10)

Tabel III.3.32 Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2024					KINERJA (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
KK 10 Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Status BMN	15	0	8	15	15	15	100

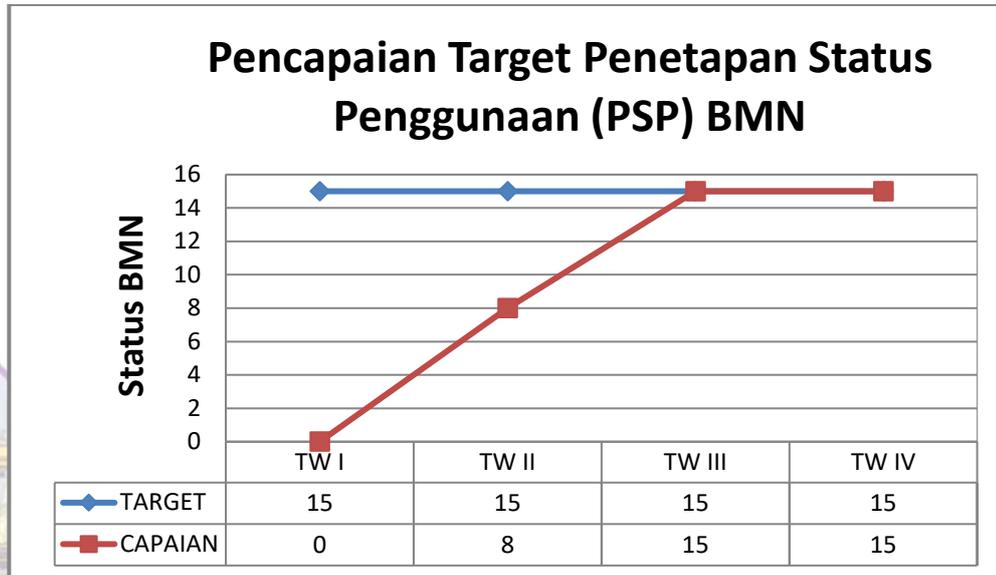
Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2024 sejumlah 15 kegiatan (lokasi). Terlihat pada Triwulan I belum terdapat realisasi, sehingga prosentase terhadap target 0%. Pada Triwulan II terdapat realisasi sejumlah 8 kegiatan PSP yaitu PSP Disnav Dumai, KSOP Teluk Bayur, KSOP Tanjung Emas, KSOP Palembang, UPP Pagimana, UPP Sinjai, KSOP Kuala Cinaku dan KSOP Utama Makassar sehingga persentase pencapaian mencapai 53,33%.

Pada Triwulan III terdapat realisasi sejumlah 7 realisasi kegiatan PSP yaitu pada UPP Sinabang, UPP Calang, UPP Pelabuhan Ratu, Disnav Palembang, KSOP Bontang, UPP Tana Paser, dan Disnav Kendari sehingga persentase capaian meningkat menjadi 100%. Adapun potensi permasalahan yang terjadi adalah kurangnya data dukung unit satker dalam penyampaian Permohonan PSP dan masih terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang telah lebih dari 6 (enam) bulan baru diajukan permohonan PSP. Upaya peningkatan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada Satker yang ada di unit Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



Grafik III.3.10 Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN



Tabel III.3.33 Realisasi Penetapan Status Pengguna (PSP) Barang Milik Negara (BMN)

No.	Lokasi	Total BMN		BMN yang sudah di PSP		Persentase	Triwulanan
		Kuantitas	Luas (m2)	Kuantitas	Luas (m2)		
1.	Disnav Dumai	5.326	917.902	5.081	907.907	95,39%	II
2.	KSOP Teluk Bayur	983	30.269	983	30.269	100%	
3.	KSOP Tanjung Emas	2.041	2.228	2.040	2.227	99,99%	
4.	KSOP Palembang	2.956	18.129	2.727	18.127	99,99%	
5.	UPP Pagimana	342	18.848	315	18.846	92,10%	
6.	UPP Sinjai	828	3.564	639	2.752	77,17%	
7.	KSOP Utama Makasar	2.956	18.129	2727	18.127	92,25%	
8.	KSOP Kuala Cinaku	494	1.880	374	1.565	75,71%	
9.	UPP Sinabang	351	23.988	303	4.044	86,32%	III
10.	UPP Calang	287	44.875	226	21.183	78,74%	
11.	UPP Pelabuhan Ratu	275	9.804	317	8.784	86,75%	
12.	Disnav Palembang	2.835	230.623	2.647	222.352	93,36%	
13.	KSOP Bontang	613	17.202	612	17.202	99,83%	
14.	UPP Tana Paser	455	27.162	393	23.214	79,78%	
15.	Disnav Kendari	2.051	91.358	1.981	91.358	96,58%	

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut



2) Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla (IKK 10) Kesepuluh (10) :

Adapun realisasi kinerja Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	KRITERIA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Jumlah	Target	17	10	10	10	15
		Realisasi	17	10	10	8	15
		Kinerja (%)	100	100	100	80	100

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 10) Kesepuluh (10):

Adapun berdasarkan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 pada Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop Secara Teratur untuk target tidak terdapat perubahan dan realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesepuluh (10)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	Status BMN	Target	10	10	10	10	10
		Realisasi	17	10	10	8	15
		Kinerja (%)	170	100	100	80	150

Sumber data : Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut





D. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Tabel III.4.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2024	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)						
SK	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan	%	10	7,14	0	-	-	-	-
								IKK 2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400
		Peningkatan Kompetensi TOT 6.09 (2 Angkatan)	480.000.000	480.000.000		60 peserta					
		Peningkatan Kompetensi TOE 3.12 (2 Angkatan)	450.000.000	450.000.000		60 peserta					
		Pelatihan BST (2 Angkatan)	69.160.000	69.160.000		56 peserta					
		Pelatihan AFF (2 Angkatan)	43.456.000	43.456.000		56 peserta					



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

							Pelatihan SAT (2 Angkatan)	19.040.000	9.520.000		56 peserta
		IKK 3	Persentase Kehandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90	90	Pengembangan Aplikasi SEHATI Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	1.000.000.000	0		Digabung di ruang lingkup pemeliharaan Aplikasi SEHATI
							Pengelolaan Data Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	200.000.000	0		Dialokasikan untuk redesign Website dan Android Aplikasi SPORTIF
							Pemeliharaan Aplikasi SEHATI Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal : Pagu Revisi: 5.798.213.000	5.798.212.650		-
							Pemeliharaan Aplikasi SIRANI Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 200.000.000 Pagu Revisi: 244.655.000	244.388.700		-
							Penyusunan Roadmap IT Bagian Organisasi dan Humas	500.000.000	500.000.000		Dialokasikan untuk kegiatan konsinyering data dan teknologi informasi
							Pemeliharaan Portal Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 200.000.000 Pagu Revisi: 450.000.000	443.744.700		-



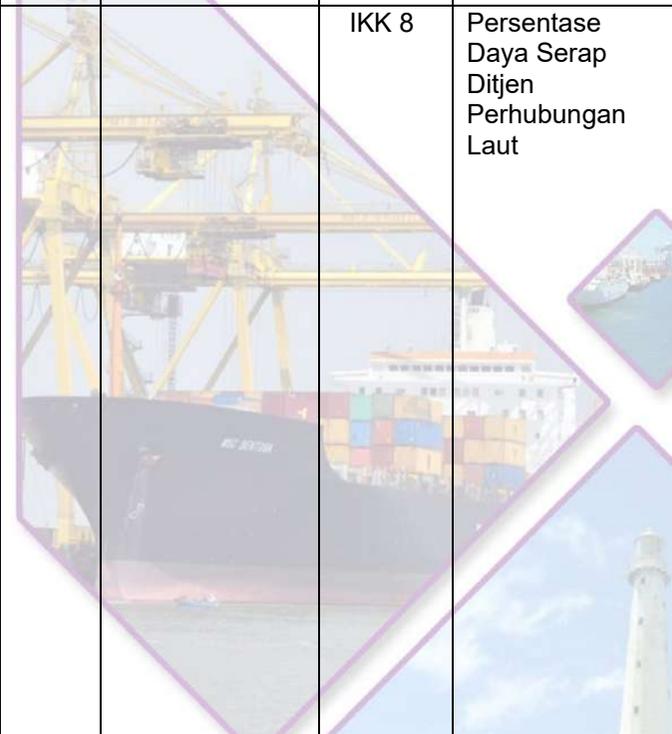
							Manage Service Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 200.000.000 Pagu Revisi: 250.000.000	239.655.600		-
							Penyusunan Informasi Statistik Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 100.000.000 Pagu Revisi: 108.800.000	106.540.000		-
							Sosialisasi dan Evaluasi Kehandalan Skala Sistem Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 250.000.000 Pagu Revisi: 711.699.000	622.042.330		-
							Workshop Pengelolaan TIK Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	250.000.000	249.240.000		-
							Monitoring dan Evaluasi Kehandalan Sistem Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Pagu Awal: 200.000.000 Pagu Revisi: 240.000.000	240.502.000		-
		IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4	4	Survey Kepuasan Atas Informasi Kehumasan	0	0		



LKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024

							Monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	200.000.000	156.396.800	0	<p>Telah dilaksanakan monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Disnav Kelas II Tual, UPP Kelas II Tual, Pangkalan PLP Kelas II Tual pada tanggal 26 - 28 Juli 2023</p> <p>Telah dilaksanakan Pembahasan Pemuktahiran dan Penetapan DIP dan DIK Tahun 2023 di Lingkungan DJPL pada tanggal 19 - 21 Oktober 2023</p>
							Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Hubla	<p>Pagu Awal = 400.000.000</p> <p>Pagu Akhir = 0</p>	0	0	Anggaran direalokasikan pada kegiatan lain
	IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang	Kerjasama	30	30	Menyusun Naskah kesepakatan bersama dan	<p>Pagu Awal : 831.400.000</p> <p>Pagu Akhir : 1.059.790.000</p>	973.848.175	8,10	-	



			Transportasi Laut				atau Perjanjian Kerjasama					
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82	80,82	-	-	-	-	-	-
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	3,835	-	-	-	-	-	-
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,70	97,63	Penyusunan Dokumen Anggaran	Pagu Awal : 4.459.407.000	7,725,169,215			
							Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kegiatan	Pagu Awal : 2.506.532.000		3,080,849,080		-
							Monitoring Daya Serap DIPA	Pagu Awal : 1.420.995.000				-



							Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT	Pagu Awal : 1.751.256.000 Pagu Akhir : 1,751,256,000	1,751,255,500		-
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	20	20	Menetapkan Rancangan dan peraturan yang ditetapkan	Pagu Awal : 592.226.000 Pagu Akhir : 2.322.173.000	2.319.139.830	0,13	
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Ditjen Hubla	Jumlah	15	15	-	-	-	-	-



E. REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2024 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.5.1 Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024**

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Belanja Pegawai	106,162,458,000	123,122,903,000	119,458,216,518
2	Belanja Barang	252,567,728,000	292,522,314,000	235,626,464,716
3	Belanja Modal	8,601,753,000	28,775,626,000	28,567,747,549
	TOTAL PAGU	367,331,939,000	444,420,843,000	
	TOTAL REALISASI			383,652,428,783
	TOTAL SISA DANA			60,768,414,217

Sumber data : OMS PAN dan Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Posisi 15 Januari 2025))



BAB IV

PENUTUP

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2024

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Ditirektorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 Tingkat Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berikut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) **Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan**

Realisasi kinerja Persentase Peningkatan Alokasi Kebutuhan SDM Ditjen Hubla Oleh Kemenpan RB Berdasarkan Kebutuhan setiap tahun telah naik persentasenya terhadap target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian terhadap target setiap tahunnya didukung peran aktif dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan alokasi kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan.

2) **Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut**

Realisasi kinerja Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan belum ada kegiatan terkait Pendidikan dan pelatihan yang menggunakan anggaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta adanya *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada realisasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ditjen Perhubungan Laut.

3) **Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut**

Realisasi kinerja Persentase Keandalan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19, sedangkan untuk Tahun 2020, Tahun 2021 Tahun 2023 dan tahun 2024 sesuai dengan



Target yang ditentukan karena sistem informasi melalui portal hubla.dephub.go.id dapat diakses 24 jam

4) Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan

Realisasi kinerja Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi / Kehumasan setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahun pencapaiannya sesuai dengan target yg telah ditetapkan indeks sebesar 4 skala dengan jumlah rata-rata responden pada masing-masing Triwulan sebesar 10 orang, sehingga nilai Kinerja Kepuasan Publik atas Layanan Informasi sebesar 100% (kategori baik). Survey dengan kemudahan akses informasi dan data terkini oleh Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Portal hubla.dephub.go.id terdapat realisasi sebesar 4 (empat) sehingga prosentasi capaian kinerja mencapai 100%.

5) Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut

Realisasi kinerja Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama Di Bidang Transportasi Laut setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal sehingga transportasi laut di Kementerian Perhubungan Khususnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berjalan dengan baik.

6) Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut

Realisasi kinerja Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut setiap tahun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi hal ini akan dilakukan fokus dalam perbaikan setiap tahunnya agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.

7) Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut

Realisasi kinerja Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dan dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya hal ini tersirat pada Tahunnya setelahnya mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini didukung oleh masing – masing sub sektor di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



8) Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut

Realisasi kinerja Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan karena *recovery* dari kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada Daya Serap masing di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

9) Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut

Realisasi kinerja Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi Di Bidang Transportasi Laut setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.

10) Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN

Realisasi kinerja Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla setiap tahun mencapai target yang telah ditetapkan.

IV.2 Langkah ke depan

Keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun Anggaran 2024 sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh jajaran unit kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Adapun Langkah-langkah dan upaya dalam penyempurnaan perencanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Laporan Kinerja dijadikan tolak ukur evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran sedangkan Indikator kinerja harus selaras dengan indikator kinerja di atasnya serta penggunaan sistem pelaporan kinerja secara elektronik;
2. Pelaksanaan penyempurnaan e-performance pada Tahun 2024 melalui kegiatan bimtek untuk memudahkan unit kerja yang mengoperasikan, dan implementasinya unit kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;



3. Melakukan himbauan kepada unit kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pada realisasi capaian bulanan untuk pengisian aplikasi e-performance yang secara rutin melakukan input data pengukuran kinerja dan upload dokumen SAKIP pada aplikasi e-sakip reviu;
4. Perlu adanya komitmen dari Pimpinan unit kerja atas pelaksanaan SAKIP pada unit kerja masing-masing dan secara berkesinambungan terus diupayakan penciptaan inovasi guna mendukung perbaikan kinerja di masa mendatang;
5. Melaksanakan percepatan pelaksanaan anggaran.



NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		JANUARI		Realisasi Bulan		JANUARI		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab				
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran					% Capaian Bulan		JANUARI	
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%	Volume	%
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,7	Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Kepala Bagian Keuangan				
						1. Penyusunan Dokumen Anggaran																
						2. Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kegiatan	1	1	100	417.755.333				122%	509.070.000							
						3. Monitoring Daya Serap DIPA	1	1	100	114.249.583				18%	20.900.000							
						4. Inventarisasi Data Perubahan Dokumen Anggaran dan Updating Data Perubahan Dokumen Anggaran pada UPT																
		IKK 9	Pencapaian Target Penyusunan Konsep Peraturan Baru/Revisi/Ratifikasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	Jumlah	20	Menunjuk Kepada Kabbag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																
						Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Direktur Jenderal	2	2	100%	592.226.000	0%	2	0	10%	0%			Kepala Bagian Hukum dan KSLN				
		IKK 10	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Ditjen Hubla	%	15	Menunjuk Kepada Kabbag Umum dan Perlengkapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:												Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan				
						Memastikan penginputan aplikasi SIMAN BMN oleh UPT berjalan dengan baik dan tepat waktu	Laporan	1	1	100%	-	0%										

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

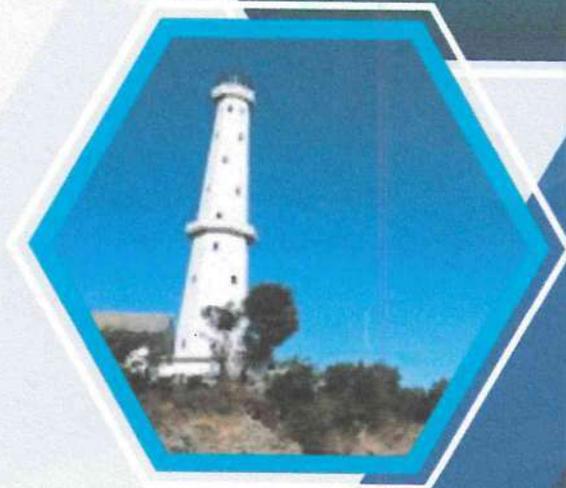
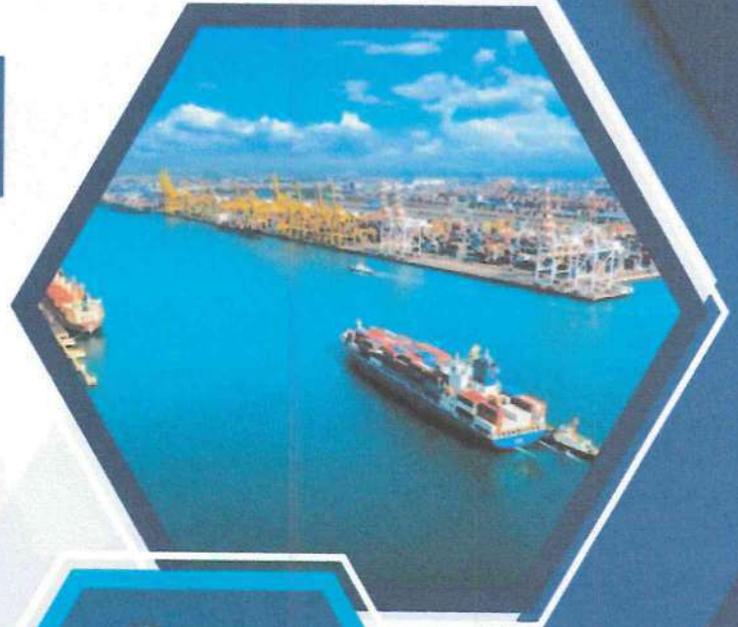
BULAN : September **TAHUN :** 2024

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Indikator Kinerja Kegiatan	Target Bulan		September		Realisasi Bulan		September		% Capaian Bulan		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab						
								Target Kinerja		Target Anggaran		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja					Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				Volume	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)								
SP.1	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	10	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																				
						1	Menyampaikan surat usulan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla kepada Menpan RB melalui Biro Kepegawaian sesuai dengan usulan dari UPT	1 (satu) Usulan kebutuhan SDMASN																		
						2	Melaksanakan Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS 2023																			
				IKK 2	Peningkatan Kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400	Menunjuk Kabag Kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																		
		-	Meningkatkan jumlah peserta Diklat yang lulus dan bersertifikat					300 peserta diikt Lulus dan Bersertifikat																		
								IKK 3	Persentase kemandatan Sistem Informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:														
		1	Pengembangan Aplikasi SEHATI	Pengembangan Aplikasi SEHATI																						
		2	Pemeliharaan Aplikasi SEHATI	Pengelolaan Data Ditjen Hubla																						
		3	Pemeliharaan Aplikasi SIRANI	Pemeliharaan Semua Modul dan Pebaikan Infrastruktur SEHATI																						
		4	Pemeliharaan Portal Hubla	Pemeliharaan Semua Modul SIRANI dan Penambahan Modul sesuai Request Direktorat dan Bacian																						
		5	Pemeliharaan Server Ditjen Hubla	Penyusunan Roadmap Ditjen Hubla terkait IT																						
6	Penyusunan Informasi Statistik Ditjen Hubla Bagian Organisasi dan Humas	Menyiapkan Laporan Semester data Ditjen Hubla																								
7	Pembangunan Roadmap Ditjen Hubla	Manage Service Server Datin Hubla																								
8	Pengelolaan Data Ditjen Hubla	Menyiapkan Laporan Semester data Ditjen Hubla																								
9	Sosialisasi Sistem Informasi Ditjen Hubla	Mensosialisasikan SI Ditjen Hubla pd Internal Hubla dan External																								
10	Workshop Pengelolaan TIK Ditjen Hubla	Melakukan Bimtek TIK ke UPT Ditjen Hubla																								
11	Monitoring dan Evaluasi Sistem kehandalan Ditjen Hubla	Monitoring dan Evaluasi Kehandalan Sistem Ditjen Hubla																								
IKK 4	Kepuasan Publik Atas Layanan Informasi/Kehumasan	Skala	4	Menunjuk Kepada Kabag Organisasi dan Humas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																						
				1	Survey kepuasan informasi atas layanan informasi/kehumasan	4	1	100%	0	0%	1	0	100%	0%		Telah dilaksanakan Survey kepuasan informasi atas layanan informasi/kehumasan	Sub Bagian Humas									
				2	Workshop Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perhubungan Laut	1	0	0%	400.000.000	0%	0	0	0%	0%		Anggaran dialokasikan pada kegiatan lain	Sub Bagian Humas									
3	Monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	3	1	100%	200.000.000	100%	1	22.211.000	100%	11%		Telah dilaksanakan monitoring PPID Pelaksana UPT KSOP Kelas II Cirebon pada tanggal 25 - 27 September 2024	Sub Bagian Humas													
IKK 5	Disepakatinya Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transportasi Laut	Kerjasama	30	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																						
1	Menunjuk Kepada Kabag Hukum dan KLSN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:							2	2	7%	831.400.000	100%	3	-	150%	0%	Adanya tambahan perjanjian dikarenakan terdapat permintaan untuk pembahasan									
IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																						
				1	Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi serta monitoring penyusunan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Ditjen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait																					
2	Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP kepada UPT/SDM Ditjen Hubla sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait																									
IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3	Menunjuk Kepada Kabag Perencanaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																						
1	Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																									
IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,7	Menunjuk Kepada Kabag Keuangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:																						
				1	Penyusunan Dokumen Anggaran	1	1	100	491.750.500						265%	1.302.713.360										



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

2024 PERJANJIAN KINERJA



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LOLLAN PANJAITAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK 6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	10
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	30
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,70
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	20
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	15

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut | Rp. 22.688.952.000,00- |
| 2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut | Rp. 243.374.856.000,00- |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut | Rp. 23.020.119.000,00- |
| 4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut | Rp. 7.715.644.000,00- |
| 5. Penunjang Teknis Transportasi Laut | Rp. 70.532.368.000,00- |

Disetujui

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Jakarta,

2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

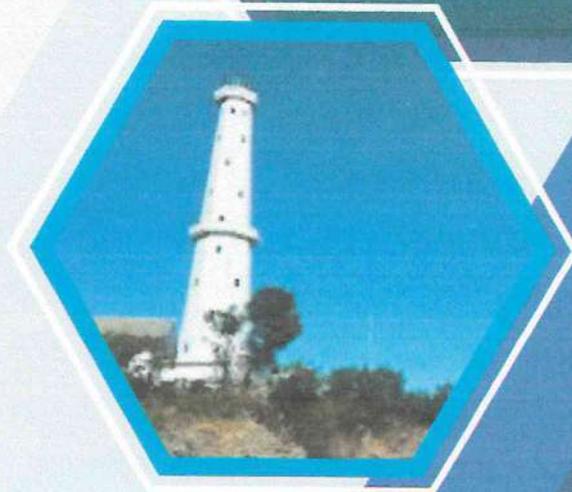


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

REVIU PERJANJIAN KINERJA 2024



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja suatu Unit Kerja dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dengan pertimbangan terdapat perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan Alokasi Anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 ini disusun.

Diharapkan Reviu Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 2024

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

	PERSETUJUAN	TANGGAL	PARAF
1	KABAG PERENCANAAN	09/01/25	
2	KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN	14/01/25	
3	KABAG SUMBER DAYA MANUSIA	14/1/25	
4	KABAG BAGIAN HUKUM DAN KSLN	15/1/25	
5	KABAG ORGANISASI DAN HUMAS	13/01/25	
6	KABAG KEUANGAN	15/1/25	

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja suatu Unit Kerja dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dengan pertimbangan terdapat perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan Alokasi Anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 ini disusun.

Diharapkan Reviu Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 2024

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LOLLAN PANJAITAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK 6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	10
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	30
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,70
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	20
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	15

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
5. Penunjang Teknis Transportasi Laut
6. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut

Anggaran

Rp.	29.119.279.000,00-
Rp.	285.013.926.000,00-
Rp.	27.507.962.000,00-
Rp.	9.939.170.000,00-
Rp.	95.243.896.000,00-
Rp.	1.257.965.000,00-

Disetujui,

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Jakarta,

2024

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT**


LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001